

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah Peneliti uraikan di atas, berikut akan disampaikan kesimpulan dan saran, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. *Cashback* memenuhi seluruh unsur untuk dapat dikategorikan sebagai penghasilan yang dapat dikenakan pajak sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU PPh. *Pertama*, tambahan saldo ataupun poin yang diterima oleh konsumen dari *platform e-commerce* merupakan tambahan kemampuan ekonomis bagi penerima *cashback*. *Kedua*, penggunaan *cashback* pada pembelanjaan berikutnya maupun sebagai investasi memenuhi unsur dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. *Ketiga*, *cashback* yang berasal dari *platform e-commerce* merupakan penghasilan bagi penerima *cashback* tanpa melihat dari mana sumber penghasilan tersebut. *Keempat*, *cashback* berupa tambahan saldo atau poin merupakan penghasilan dalam nama dan bentuk apapun.
2. Mempertimbangkan masifnya pemberian *cashback* dan nominal pemberian *cashback* yang relatif kecil, penerapan *withholding tax* dengan skema PPh final yang penghitungan pajak terutangnya didasarkan pada jumlah *cashback* yang diterima atas setiap transaksi merupakan rekomendasi kebijakan yang paling efektif untuk diterapkan. *Withholding tax* memberikan kemudahan bagi penerima *cashback* selaku subjek pajak penghasilan dari transaksi *cashback* dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Penunjukan pihak ketiga sebagai pemotong pajak juga dapat meminimalisir *administration cost* dan *compliance cost* baik bagi otoritas perpajakan maupun penerima *cashback*. Dilain sisi penerapan *withholding tax* dapat menambah beban administrasi bagi *platform e-commerce*. Dalam hal penentuan tarif pajak yang efektif dalam pengenaan pajak penghasilan atas *cashback* perlu dibuat kajian yang lebih mendalam, agar jangan sampai tarif pajak yang tidak efektif justru

akan menghambat pertumbuhan *e-commerce* dan menurunkan minat masyarakat untuk melakukan transaksi pada *platform e-commerce*.

B. Saran

1. Undang-undang Pajak Penghasilan dan ketentuan perpajakan yang ada saat ini belum ada yang mengatur secara khusus terkait dengan pajak penghasilan atas *cashback*. Melihat terdapatnya potensi pajak atas *cashback* diharapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat melalui Direktorat Peraturan Perpajakan II dapat merumuskan suatu ketentuan perpajakan atas *cashback* yang melingkupi subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dasar pengenaan pajak serta sistem pemungutan pajak dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang berfungsi sebagai payung hukum agar dapat mengakomodir pengaturan pajak penghasilan atas *cashback*.
2. Penerapan *withholding tax* dalam pemungutan pajak penghasilan atas *cashback* harus diikuti dengan pengaturan terkait dengan simplikasi bukti pemotongan pajak, mengingat aturan terkait dengan hal tersebut saat ini belum mengakomodir transaksi yang sifatnya masif seperti *cashback*. Dalam *withholding tax*, pemotong pajak yang ditunjuk harus membuat bukti potong atas setiap transaksi dan penerima *cashback* harus melaporkannya dalam SPT Tahunan. Selain itu juga diperlukan pengaturan mengenai kode pajak dan kode jenis setoran khusus atas *cashback* untuk memudahkan otoritas perpajakan untuk melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Revisi). Alfabeta.
- Alink, M., & van Kommer, V. (2000). Handbook for Tax Administrations: Organizational Structure and Management of Tax Administrations. *Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT)*.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2022). *Profil Internet Indonesia Tahun 2022*.
- Taxation Determination TD 1999/34, (1999).
<https://www.ato.gov.au/law/view/pdf/pbr/td1999-034.pdf>
- Practice Statement Law Administration, (2004).
<https://www.ato.gov.au/law/view/document?docid=psr/ga20044/nat/ato/00001>
- Bardopoulos, A. M. (2015). eCommerce and the Effects of Technology on Taxation Could VAT be the eTax Solution? In *Cham: Springer. DOI* (Vol. 10). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-15449-7_1
- Basir, A. (2022). *Pengakkan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia (Tindak Pidana Pajak Wajib Pajak Badan dan Upaya Pengembalian Kerugian pada Pendapatan Negara)*. Cipta Media Nusantara.
- Brotodihardjo, R. S. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Ketiga* (Ketiga). PT. Eresco.
- Buettner, T., Holzmann, C., Kreidl, F., & Scholz, H. (2020). Withholding-tax non-compliance: the case of cum-ex stock-market transactions. *International Tax and Public Finance*, 27(6), 1425–1452. <https://doi.org/10.1007/s10797-020-09602-9>
- Christy, F. E. (2020). Prediksi Angka Pengguna E-commerce di Indonesia 2024. 2020. <https://data.tempo.co/data/909/prediksi-angka-pengguna-e-commerce-di-indonesia-2024>
- Coppola, D. (2022). *Leading countries based on retail e-commerce sales growth in 2022*. <https://www.statista.com/statistics/266064/revenue-growth-in-e-commerce-for-selected-countries/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Qualitative, Quantitative and Mix Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications Inc.
- Darussalam, D. S. (2006). *Membatasi Kekuasaan untuk Mengenakan pajak*. Jakarta: Grasindo.
- Das-Gupta, A. (1994). A theory of hard-to-tax groups. *Public Finance*, 49(sSuppl).
- Devereux, M. P. (1996). *The economics of tax policy*.
- Dube, G. (2018). The design and implementation of minibus taxi presumptive taxes. *The Service Industries Journal*, 38(11–12), 723–741.

- Dube, G., & Casale, D. (2019). Informal sector taxes and equity: Evidence from presumptive taxation in Zimbabwe. *Development Policy Review*, 37(1), 47–66.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dunn, W. N. (2008). *Public Policy Analysis - An Introduction Fourth Edition*.
- Eugene Stiglitz, J. (2000). *Economic of the Public Sector Third Edition*. W.W Norton & Company Inc.
- Farouq, M. (2018). *Hukum Pajak di Indonesia*. Prenada Media.
- Frankel, L. (2021). Here's When the IRS Might Want a Cut of Your Credit Card Rewards. 2021. <https://time.com/nextadvisor/credit-cards/are-credit-card-rewards-taxable/>
- Hambali, M. L., & Setyowati, M. S. (2020). Administrasi Pajak Pertambahan Nilai Pada Industri Teknologi Keuangan Dompot Elektronik Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(02), 163–176. <https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1502>
- Haptari, V. D., & Aribowo, I. (2019). Analisis Aspek Perpajakan Pada Fintech Khususnya Peer To Peer (P2P) Lending Untuk Menyusun Aturan Perpajakan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 11. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/597/343>
- Haula, R., & Rianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. PT.Raja Grafindo Persada.
- Ho, Y.-C. C., Ho, Y.-J. I., & Tan, Y. (2013). Online cashback pricing: a new affiliate strategy for e-business. *Proceedings of the 34th International Conference on Information Systems (ICIS)*.
- Indonesia, C. (2022). 88,1 Persen Pengguna Internet Belanja dengan E-Commerce. 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/202111111123945-78-719672/881-persen-pengguna-internet-belanja-dengan-e-commerce>
- Ipsos. (2021). *Ipsos Global Trends 2021: Belanja Online dan Produk Lokal Dominasi Pilihan Konsumen Indonesia*. [https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-12/%5BPress Release%5D Ipsos Global Trends 2021 - Belanja Online dan Produk Lokal Dominasi Pilihan Konsumen Indonesia.pdf](https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-12/%5BPress%20Release%5D%20Ipsos%20Global%20Trends%202021%20-%20Belanja%20Online%20dan%20Produk%20Lokal%20Dominasi%20Pilihan%20Konsumen%20Indonesia.pdf)
- Iswahyudi, H. (2020). *The problem of gross receipts taxes in Indonesia: Economic distortions and policy options*. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/100617/1/MPRA_paper_100617.pdf
- Judisseno, R. K. (1997). *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

- Kusumawardhani, I., & Gunadi, G. (2021). Analisis Administrasi Pajak Penghasilan Atas Cashback pada Industri Teknologi Keuangan Dompot Elektronik Di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 802. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2246>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2012). *Management Information Systems Managing The Digital Firm (Twelfth Edition)* (Twelfth). y Pearson Education, Inc.
- Mansury, R. (1994). Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Indonesia, Uraian Umum Dan Tentang Siapa-Siapa Yang Dituju Untuk Dikenakan Pajak. *Jakarta: Bina Rena Pariwisata*.
- Mansury, R. (1996). Pajak penghasilan lanjutan. *Jakarta: Ind-Hill Co*.
- Mansury, R., & Badjrie, N. (1996). *Panduan konsep utama pajak penghasilan Indonesia*. Bina Rena Pariwisata.
- Mardiasmo, M. B. A. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi). *Penerbit Andi*.
- Margono, S. (2003). Metodologi Penelitian pendidikan (Cetakan Kedua), Jakarta: PT. *Rineka Cipta*.
- Marsuni, L. (2006). *Hukum dan kebijakan perpajakan di Indonesia*. UII Press.
- Merchant Machine. (2019). *Saturated Sectors: Finding Gaps in the Ecommerce Market in 2021*. <https://merchantmachine.co.uk/saturated-sectors/>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis 3rd Edition: Source book of Bew Methods. *Baverly Hills: SAGE Publications Inc*.
- Moleong, L. J. (2018). Metode penelitian kualitatif, cetakan ke-37. *Bandung: PT. Remaja Rosdakarya*.
- Muiz, M., Rachma, N., & Slamet, A. R. (2019). Pengaruh Sales Promotion dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Pembelian Ulang di Mediasi Variabel Kepuasan Konsumen (Survei pada Konsumen GrabBike Online di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, 8(10).
- Mukherjee, M., & Roy, S. (2017). E-Commerce and Online Payment in the Modern Era. *International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering*, 7(5), 1–5. <https://doi.org/10.23956/ijarcse/SV7I5/0250>
- Mustaqiem, D. (2014). Perpajakan dalam konteks teori dan hukum pajak di Indonesia. *Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta*.
- Mustari, N. (2015). Pemahaman Kebijakan Publik: formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan publik. *Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera*.
- Neuman, W. L. (2003). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (5th (ed.)). Allyn and Bacon.
- Nugroho, R. (2009). *Public policy*. Kelompok Gramedia.

- Organisation for Economic Cooperation and Development. (n.d.). *Glossary of Tax Term*. <https://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm>
- Pahlevi, R. (2022). Ini Sederet Promo yang Jadi Favorit Konsumen di E-Commerce. 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/27/ini-sederet-promo-yang-jadi-favorit-konsumen-di-e-commerce>
- Pinem, R. J., Afrizal, T., & Saputra, J. (2020). The Relationship of Cashback, Discount, and Voucher toward Decision to Use Digital Payment in Indonesia. *Journal of Talent Development and Excellence*, 12(3s), 2766–2774. https://www.researchgate.net/publication/342278356_The_Relationship_of_Cashback_Discount_and_Voucher_toward_Decision_to_Use_Digital_Payment_in_Indonesia
- Prasetyo, A. (2016). *Konsep dan Analisis Rasio Pajak*. PT. Elex Media Komputindo.
- PT Bukalapak.com Tbk. (2021). *Prospektus Bukalapak Tahun 2021*. https://idx.co.id/media/10062/28_buka-prospektus-ipo-2021.pdf
- PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk. (2022). *Prospektus Awal Penawaran Umum Perdana Saham PT. Gojek Tokopedia Tbk Tahun 2022*. https://www.nhis.co.id/wp-content/uploads/2022/03/i_Prospektus_Awal_GOTO.pdf
- Ravitch, S. M., & Carl, N. M. (2021). *Qualitative Research Bridging the Conceptual, Theoretical and Methodological Second Edition* (Second). Sage Publications Inc.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Richupan, S. (1987). Determinants of Income Tax Evasion. *Supply-Side Tax Policy: Its Relevance to Developing Countries*, Washington DC: IMF.
- Rosyida, S., & Anjarwati, A. L. (2016). Pengaruh store atmosfer dan promosi penjualan terhadap pembelian impulsif dengan emosi positif sebagai variabel intervening. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 16(1), 105–127.
- Rusjdi, M. (2007). *PPH Pajak Penghasilan, Edisi keempat*. PT Macanan.
- Setiawan, A., Muna, A. N., Arumi, E. R., & Sukmasetya, P. (2020). The Growth Electronic Commerce Technology and User Interface in Indonesia. *TEST Engineering and Management*, 83, 16819–16827. https://www.researchgate.net/profile/Agus-Setiawan-14/publication/342328542_The_Growth_Electronic_Commerce_Technology_and_User_Interface_in_Indonesia/links/5eed6b2d92851ce9e7f48dae/The-Growth-Electronic-Commerce-Technology-and-User-Interface-in-Indonesia.
- Setiawan, S. (2018). E-commerce Taxation and Fiscal Policy Perspective: The Case of Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 7(3), 1–9. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v7i3.900>
- Sharma, K. (2022). CASH-BACKS: PROMOTIONAL STRATEGIES AND INCOME

- TAX TREATMENT. *Embracing Change in Business, Management & Social Sciences*, 114. https://www.researchgate.net/profile/James-Henry-17/publication/361677719_Inflation_Targeting_Concepts_Application_and_the_Nigerian_Experience/links/62e4de774246456b55f68033/Inflation-Targeting-Concepts-Application-and-the-Nigerian-Experience.pdf#page=120
- SIRCLO. (2021). *NAVIGATING INDONESIA'S E-COMMERCE: OMNICHANNEL AS THE FUTURE OF RETAIL*. <https://insights.sirclo.com/>
- Slemrod, J., & Gillitzer, C. (2014). Insights from a Tax-systems Perspective. *CESifo Economic Studies*, 60(1), 1–31. <https://doi.org/10.1093/cesifo/ift015>
- Soemarso, S. R. (2007). *Perpajakan: pendekatan komprehensif*. Penerbit Salemba.
- Sommerfeld, R. M., Anderson, H. M., Brock, H. R., Madeo, S. A., & Milliron, V. (1969). *An Introduction to taxation*. Harcourt, Brace & World.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metodologi Penelitian dan Pengembangan Research and Development, Untuk Bidang Pendidikan, Manajemen, Sosial, Teknik* (Cetakan Ke). Alfabeta, CV.
- Thuronyi, V. (2004). Presumptive taxation of the hard-to-tax. *Contributions to Economic Analysis*, 268, 101–120.
- Traver, C. G., & Laudon, K. C. (2018). *E-commerce 2017: Business, Technology, Society*. Pearson.
- Turban, E., King, D., Lee, J. K., & Liang, Ting-Peng, Turban, D. C. (2015). *Electronic Commerce A Managerial and Social Networks Perspective* (Eighth Edi). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-10091-3>
- Uly, Y. A. (2022). Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia Capai Rp 108,54 Triliun di Kuartal I-2022. 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/08/03/211200826/nilai-transaksi-e-commerce-indonesia-capai-rp-108-54-triliun-di-kuartal-i-2022?page=all>
- Wijaya, S., & Yerikho, G. (2021). *PAJAK PENGHASILAN: PERLAKUAN CASHBACK OLEH PERUSAHAAN DOMPET DIGITAL*. https://www.researchgate.net/publication/351509146_PAJAK_PENGHASILAN_PERLAKUAN_CASHBACK_OLEH_PERUSAHAAN_DOMPET_DIGITAL
- Yerikho, G., & Wijaya, S. (2021). Treatment of Cashback in Income Tax. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(3), 539. <https://doi.org/10.47750/cibg.2021.27.03.074>
- Zainal Abidin, S. (2016). *Kebijakan Publik* (3rd ed.). Salemba Humanika.

Lampiran 1

Daftar Pertanyaan Utama kepada *Key Informan*

No	SubBagian	Key Informan	Daftar Pertanyaan Utama
1.	Perkembangan <i>e-commerce</i> di Indonesia dan Potensi	<ol style="list-style-type: none">1. Badan Kebijakan Fiskal2. Direktorat Peraturan Perpajakan II3. Akademisi	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pandangan Saudara terkait dengan perkembangan industri <i>e-commerce</i> di Indonesia?2. Atas perkembangan yang terjadi, apakah berdampak pada penerimaan Pajak di Indonesia?3. Bagaimana pandangan Saudara terkait dengan perkembangan <i>cashback</i> yang saat ini marak digunakan sebagai <i>sales promotion</i> pada industri <i>e-commerce</i>?4. Bagaimana pendapat Saudara terkait dengan <i>cashback</i>, jika dilihat dari sisi pelaku <i>e-commerce</i> dan penerima <i>cashback</i>?5. Bagaimana potensi penerimaan pajak atas <i>cashback</i>? Apakah jumlahnya signifikan terhadap <i>tax revenue</i>?6. Jika iya, apakah diperlukan ketentuan perpajakan khusus yang mengatur mengenai <i>cashback</i> khususnya pada industri <i>e-commerce</i>?7. Apakah terdapat rencana dari DJP untuk merumuskan

			kebijakan perpajakan khususnya atas transaksi <i>cashback</i> , maka bagaimana sebaiknya atas <i>cashback</i> ini diperlakukan?
2.	Kebijakan Perpajakan Atas <i>Cashback</i> Yang Saat ini Ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Kebijakan Fiskal 2. Direktorat Peraturan Perpajakan II 3. Akademisi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila dilihat dari konsep penghasilan (SHS Concept) yang dianut di Indonesia, apakah <i>cashback</i> yang diterima oleh penerima <i>cashback</i> dapat dikategorikan sebagai penghasilan? Apakah penerimaan yang berasal dari <i>cashback</i> dapat menjadi salah satu objek Pajak? 2. Apabila dilihat dari sisi masyarakat, apakah <i>cashback</i> merupakan penghasilan ditinjau jika dilihat dari UU Pajak penghasilan? 3. Saat ini terdapat 2 ketentuan perpajakan terkait dengan pajak penghasilan atas hadiah dan penghargaan yaitu SE-24/PJ/2018 dan PER-11/PJ/2015. Apakah kedua aturan tersebut telah cukup mengakomodir perkembangan transaksi <i>cashback</i> yang terjadi saat ini? 4. Jika tidak bagaimana seharusnya <i>cashback</i> diperlakukan?

			<p>5. Saat ini, belum ada ketentuan perpajakan yang secara khusus dan riid mengatur mengenai <i>cashback</i>, bagaimana ketentuan perpajakan yang ada saat ini apakah sudah dapat mengakomodir terkait dengan pemajakan atas <i>cashback</i>? Perluakah peraturan pajak secara khusus mengenai <i>cashback</i> di Indonesia?</p> <p>6. Apakah sebelumnya pernah dilakukan perumusan kebijakan perpajakan khususnya yang mengatur terkait dengan <i>cashback</i> pada indutrsi <i>e-commerce</i>? Jika pernah, bagaimana perkembangan saat ini?</p>
3.	Pandangangan Atas Alternatif Kebijakan Perpajakan Atas <i>Cashback</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Kebijakan Fiskal 2. Direktorat Peraturan Perpajakan II 3. Akademisi 4. Pelaku <i>e-commerce</i> 5. Penerima <i>Cahsback</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila <i>cashback</i> akan dikenakan pajak, bagaimana alternatif kebijakan perpajakan yang paling efektif? Apakah dipotong langsung oleh perusahaan atau dihitung sendiri oleh konsumen? Jika dipotong langsung kapan waktu pemotongannya? 2. Bagaimana dengan sifatnya apakah lebih tepat bersifat final atau non final? 3. Bagaimana penghitungan pajak terutangnya, dilihat dari dasar

			<p>pengenaan pajak dan tarif pajaknya?</p> <p>4. Apakah kendala-kendala yang mungkin muncul dari setiap alternatif tersebut dilihat dari sisi pelaku <i>e-commerce</i> maupun masyarakat?</p> <p>5. Apakah keuntungan dari setiap alternatif kebijakan tersebut dilihat dari sisi pelaku <i>e-commerce</i>, masyarakat maupun negara?</p> <p>6. Bagaimana tantangan yang akan dihadapi baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pelaku <i>e-commerce</i> atas penerapan alternatif kebijakan yang disampaikan?</p>
4.	Pemanfaatan <i>e-commerce</i>	Penerima <i>Cashback</i>	<p>1. Seberapa sering anda melakukan pembelian melalui <i>e-commerce</i>?</p> <p>2. Berapa jumlah uang dalam sebulan yang anda habiskan untuk melakukan pembelian tersebut?</p> <p>3. Apakah atas pembelian tersebut Saudara pernah menerima promo berupa <i>cashback</i>?</p> <p>4. Berapa total <i>cashback</i> yang anda dapatkan setiap kali melakukan pembelian? Total dalam sebulan?</p>

			<p>5. Apakah dengan adanya promo berupa <i>cashback</i>, menjadikan minat belanja Saudara menjadi meningkat?</p> <p>6. Apakah atas <i>cashback</i> yang anda terima dapat digunakan kembali untuk melakukan pembelanjaan berikutnya?</p>
5.	Sales Promotion dan Perlakuan Atas <i>Cashback</i>	Pelaku e- <i>commerce</i>	<p>1. Bagaimana proses bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya?</p> <p>2. Bagaimana pengaruh <i>sales promotion</i> bagi perusahaan untuk tetap bersaing dengan pihak lain? Posisi <i>cashback</i> sebagai <i>sales promotion</i> seperti apa persentasenya dibandingkan bentuk promosi lain?</p> <p>3. Jenis <i>sales promotion</i> apa yang diberikan oleh Perusahaan?</p> <p>4. Bagaimana posisi <i>cashback</i> sebagai salah satu <i>sales promotion</i> yang diberikan perusahaan?</p> <p>5. Bagaimana mekanisme dan prosedur pemberian <i>cashback</i>?</p> <p>6. Selama ini atau dalam 1 tahun berapa dana yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam pemberian <i>cashback</i> kepada</p>

			<i>konsumen</i> sebagai bentuk promosi?
6.	Perlakukan Atas <i>Cashback</i> Dari Sisi Masyarakat	Penerima <i>Cashback</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Saudara mengetahui terkait dengan ketentuan <i>cashback</i> secara perpajakan? 2. Apakah atas <i>cashback</i> yang diterima tersebut pernah dikakukan pemotongan pajak oleh pihak <i>e-commerce</i>? 3. Apakah Saudara pernah melaporkan penerimaan <i>cashback</i> tersebut dalam SPT tahunan?



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Lampiran 2

Permohonan Izin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

Jl. Administrasi II Pejompongan, Jakarta Pusat 10260
Telp. 5347085, 5328496, 5326396, Fax.53651793, 5329996
Email : politeknik@stialan.ac.id, website : www.stialan.ac.id

Nomor : 512 /STIA 1.1/PPS.02.3 Jakarta, 15 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tesis
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal
Gd. RM Notohamiprodjo
Jl. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat 10710

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Dewi Yuliany Saragih
NPM : 2141021070
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Formulasi Kebijakan Perpajakan Atas Penghasilan yang Diperoleh dari Cashback pada Transaksi *E-Commerce*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Ibu berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik, MA

Dr. Mela Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:
1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajar Administrasi Publik;
3. Kaprodi Magister Terapan.

Nomor : 510 /STIA 1.1/PPS.02.3 Jakarta, 15 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tesis
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Jalan Jenderal Sudirman Kav 40-42, Jakarta Selatan

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Dewi Yuliany Saragih
NPM : 2141021070
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Formulasi Kebijakan Perpajakan Atas Penghasilan yang Diperoleh dari Cashback pada Transaksi *E-Commerce*

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya, penelitian akan dilakukan di Direktorat Peraturan Perpajakan II.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terima kasih.


Wakil Direktur I Bidang Akademik,
[Signature]
Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.

Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Direktur Peraturan Perpajakan II;
3. Kajur Administrasi Publik;
4. Kaprodi Magister Terapan.

Lampiran 3

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN FISKAL**

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODUJO LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3812203, FAKSIMILE (021) 3812763, SITUS www.fiskal.kemknk.go.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-30/KF.1/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Kusumawati
Jabatan : Sekretaris Badan

Menerangkan bahwa:

Nama : Dewi Yuliany Saragih
NIM : 2141021070
Jurusan : Administrasi Publik
Perguruan Tinggi : Politeknik STIA LAN Jakarta

telah melakukan riset/wawancara secara *online* pada hari Kamis, 4 Mei 2023 dengan narasumber Ferry Afi Andi, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal untuk penulisan Tugas Akhir dengan judul "Formulasi Kebijakan Perpajakan atas Penghasilan yang Diperoleh dari *Cashback* pada Transaksi *E-Commerce*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Mei 2023
Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal



Ditandatangani secara elektronik
Dini Kusumawati





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II**

Gedung Mar'e Mohammad Lantai 11, Jln Jenderal Gatot Subroto Kav 40-42, Jakarta Selatan

**SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-10/PJ.0301/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sri Marjati
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha, Subdirektorat Harmonisasi Peraturan
Perpajakan, Direktorat Peraturan Perpajakan II

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dewi Yuliany Saragih
NIM : 2141021070
Jurusan : Administrasi Publik
Perguruan Tinggi : Politeknik STIA LAN Jakarta

telah melakukan riset/wawancara pada hari Kamis-Jumat, 4-5 Mei 2023 dengan narasumber Ilmiantio Himawan, Kepala Seksi Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh II dan Hari Santoso, Kepala Seksi Peraturan Pajak Penghasilan Badan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II untuk penulisan Tugas Akhir dengan Judul "Formulasi Kebijakan Perpajakan atas Penghasilan yang Diperoleh dari *Cashback* pada Transaksi *E-Commerce*".

Surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Mei 2023
Kepala Subbagian Tata Usaha



Ditandatangani secara elektronik
Sri Marjati



Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

a. Identitas Mahasiswa

Nama : Dewi Yuliany Saragih
Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 3 Juli 1987
Agama : Kristen Protestan
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Instansi : Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Jabatan : Pelaksana Seksi Advokasi IV, SubDirektorat Advokasi, Direktorat Peraturan Perpajakan II
Alamat Rumah : Citragran, Cluster The Meadows, Blok L6 No. 20, Jatikarya, Jatisampurna, Bekasi
Alamat Kantor : Jalan Gatot Subroto Kav 40-42, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan
Email : dewiyulianysaragih@gmail.com

b. Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tempat	Tahun	
			Masuk	Keluar
Sekolah Dasar (SD)	SD Negeri Jonggol II	Jonggol	1993	1999
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SLTP Negeri 1 Jonggol	Jonggol	1999	2002
Sekolah Menengah Atas (SMA)	SMA Negeri 3 Bogor	Bogor	2002	2005
Strata I	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Medan	2005	2009
Strata II	Magister Hukum	Jakarta	2013	2015

	Universitas Indonesia			
--	--------------------------	--	--	--

c. Pendidikan Non-Formal

Nama Kursus	Nama Institusi	Tempat	Tahun	
			Masuk	Keluar
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)	Faizal Hafied & Partner Education of Law	Jakarta	2010	2010

d. Riwayat Jabatan

Unit Organisasi	Jabatan	TMT
SubBagian Umum Kepegawaian, Bagian Kepegawaian	Pegawai Diperbantukan	15/01/2014
Bagian Perlengkapan	Pelaksana	08/07/2014
SubBagian Penyimpanan dan DistribusiSubBagian Penyimpanan dan Distribusi, Bagian Perlengkapan	Pelaksana	15/08/2014
Seksi Bantuan Hukum IV, Direktorat Peraturan Perpajakan II	Pelaksana	17/07/2017
Seksi Advokasi IV, Direktorat Peraturan Perpajakan II	Pelaksana	08/07/2019